



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Senin, 6 September 2021
Edisi : 00226435/GBP/1x/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

SENIN, 6 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. TANAMAN PANGAN :
 - Target Produksi Sulit Diraih (BI)..... 1
 - Lolos Pandemi Kekeringan Mengancam (MI)..... 2-3
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Industri Sapi RI dan Australia Alami Tekanan akibat Pandemi (ID)..... 4
3. PERKEBUNAN :
 - Komoditas Strategis Perkebunan Akan Dibuatkan Undang – Undang (SI)..... 5
 - WAPO Genjot Penjualan Biji Kopi (ID)..... 6
4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - KUR Pertanian ()..... 7
 - ASA Sumsel Jadi Penyangga Pangan Nasional (BI)..... 8-9
 - Siapa Menikmati Subsidi Pupuk? (RM)..... 16-17
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Mentan Dorong Hutan Sagu Papua Barat Jadi Agrowisata (SI)..... 10
 - Badan Pangan Terbentuk Masalah Petani Semoga Beres Deh (RM)..... 11
 - Harga Gabah Mulai Turun Bulog, Bertindaklah (RM)..... 12
 - BPN Harus Stabilkan Harga Pangan Petani (ID)..... 13
 - ASN Lamongan Wajib Beli Beras Petani Lokal (MI)..... 14
 - Menyongsong Badan Pangan Nasional (MI)..... 15
6. PERTANIAN UMUM :
 - Berebut Air dengan Kawan Sapi (K)..... 18-19

00000000 O 00000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

| KOMODITAS PADI SUMBAR |

Target Produksi Sulit Diraih

Bisnis, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memprediksi target produksi padi tahun ini sebanyak 1,5 juta ton bakal sulit diraih karena salah satu daerah mengalami gangguan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal mengatakan produksi padi hingga Juli sebanyak 810.000 ton atau 54% dari target 2021. *bl. 7*

Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi salah satu andalan penghasil padi Sumbar mengalami gangguan kerusakan saluran irigasi dan terkendala cuaca. Cuaca hujan yang mulai mengguyur wilayah tersebut akhir-akhir ini menjadi harapan untuk kembali produksi.

"Sekarang Sumbar kembali diguyur hujan. Saya berharap petani di Pesisir Selatan sudah

bisa turun ke sawah lagi dan mengolah lahan sawahnya. Kalau tidak, sulit mencapai 1,5 juta ton produksi," ujar Syafrizal, Minggu (5/9).

Di sisi lain, riwayat produksi padi Sumbar pada tahun lalu juga kurang menggembirakan. Dengan luas sawah 194.000 hektare (ha) hanya menghasilkan padi 1,395 juta ton. Angka tersebut juga turun dibandingkan dengan 2019.

Untuk mendorong petani kembali turun ke sawah, Syafrizal sudah menggelar pertemuan dengan semua penyuluh untuk melakukan tanam serentak bagi sawah yang belum ditanami.

"Jadi memang kita melihat, banyak kawasan yang belum ditanam padi, sehingga perlu segera penanaman sehingga luas tanamnya meningkat dan luas panen juga me-

ningkat."

Syafrizal menjelaskan bahwa ada dua hal penting dalam meningkatkan produksi padi Sumbar. *Pertama*, produktivitas yang dihitung dari hasil per ha dan yang *kedua* adalah luas panen namun sangat bergantung dengan air.

Sementara itu terkait dengan benih padi, Syafrizal mengatakan selama ini penggunaan benih bersertifikat hanya sekitar 40% di seluruh wilayah Sumbar sehingga pada 2022 akan menaikkan ditingkatkan sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yaitu meningkatkan produksi padi dan jagung.

"Kami menargetkan 150.000 ha dibantu dari dana APBN, dan sebanyak 100.000 ha hektar dibantu dari dana APBD," katanya. *(HSE)*

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Lolos Pandemi Kekeringan Mengancam

Ekonomi perdesaan tetap mantap di masa pandemi covid-19. Namun, dampak kemarau membuat warga desa mulai khawatir.

BENNY BASTIANDY

benny@mediaindonesia.com

BELUM satu bulan, sejumlah petani di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menanam padi. Kala itu sesekali hujan masih turun sehingga areal persawahan tetap basah.

Namun, sejak dua pekan lalu, hujan sudah tidak ada. Tanaman yang kini berumur 20 hari pun terancam kekeringan.

Kekhawatiran terlihat dari wajah Supiah, 51, petani di Kampung Golebag, Desa Sukamanah, Kecamatan Karantengah. Nada bicaranya juga terbata.

"Di sawah tetangga, tanahnya sudah sangat kering. Kalau beberapa hari ke depan tidak ada air, sawah saya juga akan mengalami nasib serupa," keluhnya.

Sawah Supiah mendapat

pasokan air dari irigasi yang mengalirkan air dari sungai. Namun, saat ini volumenya makin mengecil.

Musim tanam kali ini, Supiah juga mengaku khawatir dengan gangguan hama. "Tungro dan tikus mulai muncul."

Plt Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Nurdinati mengaku tahun ini Kabupaten Cianjur kembali menargetkan produksi sekitar 1 juta ton gabah. Untuk itu, pihaknya akan melakukan intervensi jika petani menghadapi gangguan.

"Kami optimistis target itu bisa tercapai, bahkan lebih. Kami sudah mengoptimalkan sumber air sebagai antisipasi menghadapi kekeringan," tandasnya.

Kirim air bersih

Kekeringan lahan pertanian juga sudah merebak di Kabupaten

Garut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengaku sudah menerima laporan kekeringan lahan sawah dan kekurangan air bersih di Kecamatan Cibat, Sukawening, Sukaresmi, Leles, Karangpawitan dan Cibiuk.

Kepala Pelaksana BPBD Satria Budi menyatakan sejumlah petani sudah mengantisipasi kekeringan dengan menanam palawija. "Kami juga menemukan petani lain tetap menanam padi dan mengatasi kekeringan dengan mengalirkan air sungai ke sawah menggunakan mesin pompa."

Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, krisis air bersih sudah terjadi di 7 desa pada 4 kecamatan. BPBD pun telah mengirim bantuan air bersih sebanyak 468 tangki ke wilayah terdampak.

"Kami sudah mendistribusikan 2,3 juta liter air bersih ke tujuh desa itu. Kekeringan sudah melanda wilayah itu sejak Juni lalu, dan kami mengirim mulai 4 Juni," jelas Kabid Kedaruratan BPBD Yuwana Haris.

BPBD mengerahkan tiga mobil tangki setiap hari. Untuk kegiatan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

itu, BPBD menggulirkan dana Rp241 juta untuk pengadaan total 750 tangki.

Di sisi lain, bencana banjir bandang yang melanda Dusun Malapedho, Desa/Kecamatan Inerie, Ngada, Nusa Tenggara Timur, masih menyisakan duka. Sampai kemarin, satu korban, yakni Mikael Jeko, 40, belum ditemukan.

Sebelumnya, dalam peristiwa itu yang terjadi Jumat (3/9) malam itu, Milka Tuna, 4, dan Maria Goreti Dhiu, 38, ditemukan tidak bernyawa. Maria yang tengah hamil 5 bulan ialah istri Mikael.

"Hari ini masih pencarian terhadap korban yang belum ditemukan masih dilanjutkan," kata Kepala BPBD Ngada Elen Watu.

Kabid Humas Polda NTT Komisaris Besar Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan evakuasi dan pencarian korban dipimpin Kapolres Ngada Ajun Komisaris Besar Rio Cahyowidi. "Selain evakuasi, anggota dilibatkan untuk melakukan upaya tanggap darurat bagi korban bencana." (BK/AD/JS/PO/YK/N-2)

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Industri Sapi RI dan Australia Alami Tekanan akibat Pandemi

JAKARTA – Industri sapi Indonesia maupun Australia sama-sama mengalami tekanan akibat badai pandemi Covid-19. Pandemi terus melemahkan permintaan sapi dan daging sapi di Indonesia akibat berkurangnya daya beli konsumen dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal tersebut turut mempengaruhi industri sapi di Australia. Total ekspor sapi hidup Indonesia pada tahun ini diproyeksikan 36% di bawah tingkat ekspor 2019.

Demikian termuat dalam Joint State of the Industry (JSOI) 2021 Mid-Year Update Report atau laporan Status Industri Indonesia Australia yang merangkum status perdagangan sapi hidup dan produk daging sapi secara bilateral antara Australia dan Indonesia. JSOI dirilis Kemitraan Indonesia-Australia untuk Ketahanan Pangan di Sektor Daging Merah dan Sapi (The Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector/The Partnership).

Tantangan perdagangan di sektor daging merah dan sapi antara Indonesia dan Australia terus berlanjut. Laporan JSOI terbaru menyoroti tantangan finansial yang saat ini masih dihadapi oleh usaha penggemukan (*feedlot*) dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Australia dan Indonesia yang sangat terkendala oleh terbatasnya pasokan dan harga sapi yang tinggi. Banyak di antara usaha

tersebut yang melaporkan telah mengalami kerugian operasional. Sementara itu, industri daging merah dan sapi Indonesia terus mengalami tekanan akibat Covid-19.

Riyatno, *Co-Chair Partnership Indonesia*, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi industri saat ini. PPKM yang diberlakukan di seluruh Indonesia sebagai upaya mengendalikan pandemi Covid-19 varian Delta secara signifikan melemahkan daya beli konsumen dan permintaan daging sapi. Laporan terbaru JSOI menyajikan sejumlah informasi penting bagi pemerintah dan industri di masa sulit ini. "Namun begitu, turunnya angka kasus aktif dan kasus baru Covid-19, serta upaya gencar perluasan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan naik lebih dari 4% tahun ini," ujar dia.

Chris Tinning, *Co-Chair Partnership Australia*, menyatakan, kemungkinan kondisi akan membaik pada paruh kedua 2022. "Curah hujan yang baik di Australia tahun ini membantu produsen Australia meningkatkan kembali populasi sapi dan mempertahankan stok sapi mereka. Karena itu, harga ekspor sapi hidup yang tinggi saat ini seharusnya bisa turun pada paruh kedua tahun 2022, dan bisa meredakan tekanan

keuangan yang dialami usaha *feedlot* dan RPH di Australia dan Indonesia. Saya senang Laporan JSOI terbaru rilis, sehingga dapat membantu pemerintah dan kelompok industri melalui masa ekonomi yang tidak pasti ini," kata dia.

Usaha *feedlot* dan RPH di Indonesia dan Australia terus berjuang untuk tetap mempertahankan profitabilitas dalam menghadapi pasokan sapi yang terbatas, rekor harga sapi Australia yang tinggi, dan kenaikan harga pakan. Pandemi Covid-19 terus melemahkan permintaan sapi dan daging sapi di Indonesia, akibat berkurangnya daya beli konsumen dan PPKM. Permintaan global dan domestik Australia yang kuat serta jumlah ternak Australia yang jauh lebih kecil kemungkinan membuat harga sapi bakal tetap tinggi hingga April atau Mei 2022. (dho)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 4/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Komoditas Strategis Perkebunan Akan Dibuatkan Undang-Undang

JAKARTA - Komoditas strategis perkebunan yang selama ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan diproteksi menggunakan payung hukum berupa undang-undang (UU). Harapannya, komoditas-komoditas yang dilindungi tersebut akan lebih berkembang dan terus berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

"Hingga saat ini masih ada kekosongan hukum yang bisa memproteksi komoditi-komoditi strategis perkebunan kita," ujar Anggota Komisi IV Firman Subagyo, di Jakarta, kemarin. 51/4/9/4

Padahal, lanjut Firman, ada beberapa komoditas perkebunan yang telah terbukti berkontribusi pada perekonomian nasional. Tembakau, misalnya, berkontribusi pada penerimaan negara dari cukai sekitar Rp172 triliun. "Itu

belum termasuk dari pajak dan penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor tembakau, baik di *on farm* (hulu) maupun di industri hingga pemasarannya," ujar politikus Partai Golkar ini.

Sementara itu, untuk kelapa sawit lebih besar lagi. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan pada 2020 sawit menghasilkan devisa sebesar USD22,97 miliar atau setara dengan Rp321,5 triliun.

Kontribusi itu belum termasuk pajak dan tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan industri kelapa sawit ini mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja dengan rincian 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

Menurut Firman Subagyo, komoditas yang akan diproteksi dalam UU ini nantinya bukan hanya tembakau dan kelapa sawit, tetapi juga ada kopi, karet, teh, maupun tebu. "Mungkin nanti akan ada lima atau enam komoditas," katanya.

Menurut Firman, indikator komoditas perkebunan yang akan diatur dan diproteksi oleh UU ini, antara lain, komoditas tersebut berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, komoditas tersebut harus menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Indikator lainnya yakni komoditas tersebut berdampak pada kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. "Kenapa indikator ini kita masukkan? Karena, bercocok tanam itu tidak semata-mata bermotif ekonomi belaka.

Namun, di situ merupakan kultur masyarakat kita ini yang agraris ini," papar Firman Subagyo.

Sejatinya, kata Firman, memproteksi komoditas strategis dengan UU itu sudah dilakukan banyak negara. Amerika Serikat (AS), misalnya, sudah mempunyai UU yang melindungi komoditas kedelai, jagung, kapas, dan gandum. "Karena komoditas-komoditas itu dianggap sebagai strategis dan menghasilkan devisa bagi AS," ujar Firman.

Sementara itu, negara Turki memiliki UU yang melindungi tembakau, Malaysia mempunyai UU perkelapasawitan, dan Jepang mempunyai UU perberasan. Namun, ironis bagi Indonesia, komoditi-komoditi strategisnya tidak ada perlindungan hukumnya.

sudarsono

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 6/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☒ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

WAPU Genjot Penjualan Biji Kopi

JAKARTA – PT Wahana Pronatural Tbk (WAPU) pada semester II-2021 akan fokus menggenjot penjualan komoditas biji kopi dengan mulai memasok biji kopi jenis Robusta kualitas premium dan jenis Arabika mengingat saat ini permintaan pasar ekspor terutama di Eropa cukup tinggi. Upaya ini diharapkan dapat memenuhi target pertumbuhan penjualan 30-40% tahun ini.

Direktur Utama WAPU Artha Lovie Aprillailie mengatakan, selama ini, WAPU hanya memasok biji kopi jenis Robusta ke pasar ekspor, itupun yang kualitas biasa. Namun, untuk sisa empat bulan ke depan pada tahun ini WAPU juga akan mulai memasok biji kopi jenis Robusta kualitas premium yang harganya sekitar Rp 20 ribu per kilogram (kg) dan yang biasa Rp 18 ribu per kg. Pada

saat sama, juga merambah biji kopi jenis Arabika karena permintaan juga cukup tinggi.

"Upaya kami merambah Arabika dan *upgrade* Robusta ke *premium grade* ini untuk menambah pangsa pasar perseoran," kata Lovie saat paparan publik WAPU di Surabaya, Rabu (25/8). (9-11)

Lovie menuturkan, pihaknya ingin memanfaatkan adanya permintaan pasar ekspor terh-

hun ini naik 30-40% dibanding tahun 2020 juga bisa tercapai," ungkap dia.

Selama semester I-2021, WAPU membukukan penjualan Rp 215 miliar dan dari nilai itu perdagangan biji kopi menyumbang sekitar 40%. Selain biji kopi, WAPU juga memasok ke *supplier* rumput laut untuk memenuhi pasar ekepor serta menjalankan bisnis resi gudang. (ros)

adap komoditas biji kopi jenis Arabika dan jenis Robusta kualitas premium. Tingginya permintaan di pasar ekspor untuk produk-produk tersebut terkait dengan adanya kekeringan di Belgia sehingga pasokan kopi di negara itu saat ini kurang bagus. "Harapan kami, upaya ini bisa memperbaiki omzet dan penjualan di sisa empat bulan ke depan sehingga target penjualan ta-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 6/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 9/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☒ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☒ Republika		☐ Pojok/Karikatur



KUR PERTANIAN

Ketua Dewan
Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
Wimboh Santoso
(kanan) didampingi
Bupati Malang Sanusi
(kiri) memetik buah
alpukat di sela kegiatan
Kunjungan Ekosistem
Pembiayaan KUR

Klaster Sektor
Pertanian di Kebun
Pembibitan Alpukat
Pameling, Lawang,
Malang, Jawa Timur,
Sabtu (4/9). OJK
berupaya
meningkatkan akses
pembiayaan perbankan
kepada petani dengan
memperbanyak
pembentukan klaster
R. 9 pertanian.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 4/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 6/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

FOOD ESTATE

ASA SUMSEL JADI PENYANGGA PANGAN NASIONAL

Dinda Wulandari & Nurbaiti
redaksi@bisnis.com

Bisnis, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berkomitmen menjadi penyangga pangan nasional melalui sejumlah program lumbung pangan atau *food estate* di beberapa daerah yang didukung oleh infrastruktur memadai.

Salah satu pendukung proyek lumbung pangan di Sumsel adalah Bendungan Tiga Dihaji yang kini sedang dalam proses pembangunan.

Bendungan yang berada di Desa Sukabumi, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan itu masih berlanjut dan segera rampung untuk memperkuat posisi Sumsel sebagai lumbung pangan nasional.

"Bendungan Tiga Dihaji itu akan menjadi bendungan satu-satunya di Sumsel untuk mengaliri lahan irigasi baru seluas 25.423 hektare," ujar Gubernur Sumsel Herman Deru, Jumat (3/9).

Gubernur pun optimistis Sumsel dapat menjadi provinsi penghasil pangan yang diperhitungkan secara nasional. Menurutnya, bendungan itu nantinya dapat menyuplai air secara konstan ke berbagai kabupaten yang memiliki lahan pertanian.

Pembangunan bendungan tersebut merupakan salah satu jawaban dari keluhan para petani terkait dengan pengairan untuk lahan

pertanian. "Bendungan ini juga akan mengairi 15.000 ha lahan cetak sawah baru, sehingga kita harus terus bersinergi," tuturnya.

Bendungan Tiga Dihaji mampu menampung sedikitnya 105 juta meter kubik air. Oleh karena itu, proyek senilai Rp3 triliun tersebut diharapkan memiliki manfaat besar bagi sektor lainnya, seperti perikanan, air baku PDAM, sumber energi listrik, hingga pariwisata.

"Kami juga akan mengusulkan akses jalan baru sepanjang 7 kilometer untuk menghubungkan bendungan ke Danau Ranau," katanya.

Selain Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan, Deru menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR tengah membangun infrastruktur irigasi berupa bendungan dan saluran irigasi di Kota Pagar Alam.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan

konektivitas menuju lokasi pengembangan lumbung pangan di daerah tersebut.

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar mengatakan konektivitas diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien.

"Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian," kata Iskandar

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/10/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

dilansir dari Antara.

Infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan lumbung pangan dapat menunjang target OKI sebagai penyangga Food Estate Nasional di Provinsi Sumatra Selatan, seperti dibangunnya Duplikasi Jembatan Air Dusun Anyar, Jembatan Air Talang Pangeran, dan Jembatan Gantung Sungai Babatan Kecamatan Pedamaran.

Menurut Iskandar, tiga wilayah Food Estate di OKI patut mendapat dukungan infrastruktur antara lain Kecamatan Sungai Menang, Jejawi dan Kecamatan Pampangan.

Apalagi, imbuhnya, sektor pertanian juga merupakan sumber daya utama dari kabupaten OKI. "Terbukti saat ini OKI menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan produktivitas mencapai 1 juta ton gabah kering giling [GKG]," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mendukung dalam pengembangan wilayah OKI sehingga bisa berkontribusi terhadap produktivitas pangan nasional.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman



Pangan dan Hortikultura Kabupaten OKI Sahrul mengatakan Kabupaten OKI menyiapkan 59.118 ha lahan sawah untuk mendukung program lumbung pangan baru multi komoditas Food Estate dari Kementerian Pertanian.

Lahan baku sawah itu tersebar di 17 Kecamatan. "Food Estate diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah kepada petani melalui korporasi petani," kata dia.

Sahrul menjelaskan bahwa terdapat tiga kecamatan yang mendominasi luasan sawah Food Estate, yakni Kecamatan Sungai Menang seluas 7.885 ha, Kecamatan Pampangan seluas 6.271, dan Kecamatan Jejawi 6.041 Ha.

WAY SEKAMPUNG

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada Kamis (2/9).

"Alhamdulillah, Bendungan Way Sekampung yang dibangun sejak 2016, hari ini telah selesai dan siap difungsikan," kata Jokowi dikutip dari YouTube Setpres, Kamis (2/9).

Bendungan yang dibangun dengan biaya Rp1,78 triliun tersebut memiliki kapasitas tampung 68 juta meter kubik dengan luas genangan 800 ha.

“

Bendungan Tiga Dihaji itu akan menjadi bendungan satu-satunya di Sumsel untuk mengaliri lahan irigasi baru seluas 25.423 hektare.

Kepala Negara menyampaikan bahwa bendungan tersebut multifungsi yaitu sebagai irigasi, menyediakan air baku, pembangkit listrik hingga pengendalian banjir.

"Bendungan ini juga mampu mengairi 55.000 hektare daerah irigasi eksisting dan 17.500 hektare daerah irigasi baru," ujarnya.

Bendungan Way Sekampung juga diharapkan dapat menyediakan air baku sebanyak 2.737 liter per detik hingga menjadi sumber pembangkit listrik 5,4 megawatt.

Selain itu, bendungan tersebut juga akan menyuplai air ke salah satu lumbung pangan nasional sehingga harus dijaga keberlanjutannya.

"Dengan adanya bendungan ini, intensitas tanam juga bisa ditingkatkan dari semula dua kali setahun menjadi tiga kali setahun. Artinya, produksi dipastikan akan meningkat dan kesejahteraan petani juga ikut meningkat. Ini harapan kita," ujar Jokowi. (Aprianus

Dani Tolok)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 4/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Mentan Dorong Hutan Sagu Papua Barat Jadi Agrowisata

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mendorong lahan hutan sagu di Sorong, Papua Barat, menjadi kawasan agrowisata. Harapannya, hutan sagu tersebut bisa mewujudkan pertanian yang maju menuju kedaulatan pangan di Papua Barat.

Dalam keterangan tertulis Mentan mengharapkan hilirisasi yang dilakukan oleh para pelaku dan pihak-pihak terkait pertanian bekerja sama untuk mendapatkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini *integrated farm*, tolong muspida (musyawarah pimpinan daerah) berkoordinasi, bantu Bupati untuk *kerubutin*. Kita buat industrinya, tidak hanya sagu, tidak hanya Melki (petani) buat sagu saja, tapi sekitarnya ada peternakan, di sana ada buah horti, kemudian tanaman pangan, dan lainnya. Jadi ada *integrated farm* dan modern, semua yang dimiliki rakyat," kata Syahrul ketika melakukan kunjungan kerja di Distrik Aimas, Kelurahan Malawi, Kabupaten Sorong, Papua Barat, kemarin.

Mentan menegaskan Papua Barat merupakan wilayah penghasil sagu terbesar Nusantara dan berharap pertanian yang diusahakan secara bersama dapat dipoles dengan sentuhan teknologi melalui pelatihan-pelatihan.

”*Di sini sagunya oke dan pertanian enggak bisa sendiri-sendiri, harus ramai-ramai. Agrowisata, satu kali turun semua kena. Jadi jangan cuma sagu, harus ada bimtek (bimbingan teknis).*”

SYAHRUL YASIN LIMPO
Menteri Pertanian (Mentan)

"Di sini sagunya oke dan pertanian enggak bisa sendiri-sendiri, harus ramai-ramai. Agrowisata, satu kali turun semua kena. Jadi jangan cuma sagu, harus ada bimtek

(bimbingan teknis). Istri-istri harus bimtek, anak muda harus kursus, kursus harus ada hasilnya, seperti sagu harus jadi mi. Kemudian ada perlakuan teknologi, biar tampilan (pati) menjadi putih bersih," ungkap Mentan Syahrul.

Lebih lanjut Mentan menyebutkan beberapa syarat yang dapat menunjang pertanian di Sorong menjadi baik. Ada tunjangan infrastruktur

alam, sumber daya manusia, dan modal yang dibutuhkan seperti penerapan kredit usaha bagi rakyat pertanian.

"Syarat pertanian yang bagus itu yang pertama lahannya oke, yang kedua airnya bagus, yang ketiga rakyatnya mau bersama pemerintah. Jangan rakyat saja pemerintahnya enggak, atau pemerintahnya saja rakyatnya enggak, kemu-

dian seterusnya membutuhkan pelatihan, lalu butuh modal. Pak Jokowi sudah memberikan KUR," sebutnya.

Sementara itu, Bupati Sorong Jhony Kamuru yang hadir dalam kunjungan kerja Mentan menyampaikan atas saran Mentan untuk dilakukan pengembangan agrowisata di daerahnya.

"Pak Menteri, kami sangat bersedia untuk pengembangan komoditas pertanian untuk memajukan Sorong. Bukan hanya bantuan dari Gubernur, namun kami berharap ada bantuan-bantuan langsung untuk pengembangan Sorong dari Kementerian Pertanian melalu dinas pertanian," katanya.

Pada kegiatan kunjungan kerja tersebut Mentan berkesempatan meninjau lahan dan rumah pengolahan sagu sederhana milik petani Melkianos Malagam yang mengelola kurang lebih tiga hektare lahan sagu. 9/4/4

Tercatat sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengekspor sagu tahun 2020 sebesar 13.000 ton atau senilai Rp40 miliar. Kemudian selama kurun waktu 2020 hingga semester I/2021, volume ekspor sagu meningkat 5,1%.

Luasan areal sagu nasional saat ini mencapai 196.831 ha dengan 99,65% areal berupa perkebunan rakyat. Papua dan Papua Barat merupakan sentra terbesar sagu nasional yang berkontribusi 29,2% dari areal sagu nasional.

■ sudarsono

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 5/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 7
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☒ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Badan Pangan Terbentuk Masalah Petani Semoga Beres Deh

ANGGOTA Komisi IV DPR Sutrisno mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN). Kehadiran badan ini diyakini akan menjawab persoalan stabilitas pangan, yang sampai saat ini terus menghimpit pelaku usaha tani.

"Ini perjuangan panjang Komisi IV. Insyallah lembaga inilah yang akan menjawab berbagai macam persoalan petani sejak kami hadir di gedung wakil rakyat ini," tegasnya, di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sutrisno mengatakan, persoalan pangan ini memang sangat kompleks dan terus berkembang. Persoalan tersebut dari masalah impor pangan, masalah anjloknya harga di tingkat petani, hingga masalah beras disopas yang sampai hari ini belum ada penyelesaian.

Sementara Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 menugaskan Perum Bulog menjaga Ketahanan Pangan Nasional. Dalam perpres ini, terdapat empat tugas besar Bulog. Di antaranya menjaga stabilitas pangan, memperkuat cadangan beras Pemerintah, hingga impor beras. RM 15/9/21

"Sayangnya, Bulog tidak punya keleluasaan mengambil langkah. Karena terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan pangan ini," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara anggota Komisi IV DPR Slamet menyoroti impor cabe yang masuk tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor cabe sepanjang Semester I-2021 sebanyak 27.851,98 ton dengan nilai 59,47 juta dolar AS. Angka tersebut meningkat dibanding realisasi impor

pada Semester I-2020, yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai 34,38 juta dolar AS.

Cabe yang diimpor Pemerintah pada umumnya adalah cabe merah, termasuk juga cabe rawit merah. "Ini menunjukkan betapa Pemerintah memang tidak berpihak kepada petani kita," katanya.

Di satu sisi, sambung politisi PKS ini, harga cabe di tingkat petani anjlok. Karena itu, dia memahami jika kemudian ada petani cabe kemudian mengamuk. Kemarahan petani ini menandakan adanya masalah serius yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah.

Terkait hal ini, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli

Ardiansyah menegaskan, BPN akan menjadi solusi panjang untuk menghadirkan kebijakan pangan yang komprehensif. Menjamin kesejahteraan petani dan mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri. "Ini dapat didesakkan melalui Badan Pangan Nasional yang sudah disahkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021," katanya.

Agus menilai, BPN merupakan hal positif yang harus diapresiasi. Apalagi dalam Perpres tersebut, terdapat sembilan komoditas pangan yang menjadi pengawasan Badan Pangan Nasional, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabe.

Dengan kewenangannya, BPN akan mampu secara maksimal menjalankan fungsi perumusan kebijakan pangan yang komprehensif. Mulai dari produksi pangan di tingkat petani, distribusi, sampai dengan hingga stabilisasi harga. ■ KAL

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 4/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Gabah Mulai Turun Bulog, Bertindaklah

ANGGOTA Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta pemerintah terus meningkatkan serapan gabah dari petani di masa pandemi Covid-19. Serap gabah petani ini sangat penting, lantaran di beberapa daerah harga gabah mengalami tren penurunan.

Johan mengatakan, beberapa daerah sentra penghasil utama beras seperti di Sumbawa, harga gabah ada di kisaran Rp 3.600 sampai Rp 4.000 per kilogram. Jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Untuk itu, dia meminta pemerintah segera merespons turunnya harga gabah ini dengan meningkatkan serapan beras Bulog.

"Saya minta Bulog segera bertindak agar harga gabah di tingkat petani stabil. Khususnya serap gabah petani di Pulau Sumbawa supaya kesejahteraan mereka meningkat," harap Johan di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi IV Yessy Melania. Politisi muda Fraksi NasDem ini mengingatkan, peran Bulog saat ini sangat penting dalam stabilisasi harga maupun pengelolaan stok cadangan pangan pemerintah.

Kinerja Bulog diminta optimal untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan pangan nasional.

Yessy bilang, jatuhnya

harga gabah di beberapa wilayah harus segera direspons. Harga gabah di bawah HPP ini tentu mere-sahkan petani. Karena itu, gabah petani kudu terserap dengan harga yang baik, guna menjaga semangat petani untuk terus berproduksi. 4M/4/6/7

"Kami juga mendukung Perum Bulog dalam penyerapan hasil produksi petani disertai dengan dukungan

pendanaan dari pemerintah," katanya.

Sementara, Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi optimis swasembada beras bisa segera diwujudkan.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus beras terjadi dari tahun ke tahun. Pada 2018, surplus beras 4,37 juta ton, 2019 surplus 2,38 juta ton dan 2020 surplus 1,97 juta ton.

"Ini kan surplus bisa dijumlah menjadi surplus kumulatif 8,72 juta ton, karena pengertian surplus ini adalah produksi dikurangi konsumsi setiap tahunnya dan tidak ada impor," kata Gandhi.

Gandhi melihat, surplus beras ini berkat berbagai terobosan Kementerian Pertanian (Kementan). Seperti program optimasi peningkatan indeks pertanaman, percepatan tanam, peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam baru, penyaluran benih unggul

dan fasilitasi pupuk subsidi.

Selain itu juga, ada dukungan program pengawalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya untuk padi lebih dari Rp 10 triliun, mekanisasi prapanen, panen dan pascapanen.

"Program yang dilaksanakan Kementan saat ini berkontribusi dalam surplus beras ini," yakinnya.

Gandhi mengatakan, jika pemerintah terus mampu memacu petani meningkatkan produksi dan tidak ada impor beras, maka di akhir tahun 2021 bisa dipastikan swasembada beras dapat terwujud.

Meski kondisi cukup sulit akibat pandemi Covid 19, ternyata pada tahun 2020-2021 proses produksi tetap berjalan dengan baik dan petani terus bergerak tanam padi. ■ KAL

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/30/2021
HALAMAN 11
RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Berita Foto
☐ Opini/Artikel
☐ Tajuk
☐ Pojok/Karikatur |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | |

BPN Harus Stabilkan Harga Pangan Petani

JAKARTA – Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan bahwa kehadiran Badan Pangan Nasional (BPN) nantinya harus bisa menstabilkan harga pangan di tingkat petani. Dengan kewenangan yang dimilikinya maka BPN harus mampu secara maksimal menjalankan fungsinya dalam perumusan kebijakan pangan yang komprehensif, mulai dari produksi pangan di tingkat petani, distribusi, sampai dengan stabilisasi harga agar kesejahteraan petani meningkat.

Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah menjelaskan, permasalahan rendahnya harga di tingkat petani harapannya dapat segera teratasi. Untuk jangka pendek, sinergi antara pemerintah dengan petani melalui koperasi harus menjadi opsi utama. Sampai saat ini, kerja sama antara Bulog atau BUMN pangan dengan koperasi-koperasi milik petani untuk penyaluran pangan ke lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat dinilai belum maksimal. Padahal cara ini dipandang SPI efektif untuk mengatasi masalah rendahnya serapan hasil pertanian oleh konsumen dan harga di tingkat petani. "Sementara untuk kebijakan jangka panjang, harus didorong sebuah kebijakan pangan yang komprehensif yang menjamin kesejahteraan petani dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional," ujar dia dalam keterangannya, kemarin.

Hal tersebut dapat didesakkan melalui BPN yang pada 29 Juli lalu sudah disahkan melalui Perpres No 66 Tahun 2021. Keberadaan BPN merupakan hal positif yang harus diapresiasi, apalagi dalam Perpres itu terdapat sembilan komoditas pangan yang menjadi pengawasan BPN, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. "Dengan kewenangan yang dimilikinya, BPN harus mampu secara maksimal menjalankan fungsinya



Agus Ruli Ardiansyah

dalam perumusan kebijakan pangan yang komprehensif, mulai dari produksi pangan di tingkat petani, distribusi, hingga stabilisasi harga. Dalam konteks pandemi, kehadiran badan ini juga harus mampu menjawab persoalan hak atas pangan bagi kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang rentan dan layak mendapat bantuan pangan," kata Ruli.

Ruli juga menyebutkan, masalah penting yang harus segera diatasi adalah buruknya koordinasi dan keterbukaan informasi antar kementerian/ lembaga, khususnya mengenai data ketersediaan pangan. "Ini penting mengingat koordinasi antarkementerian/ Lembaga perihal pangan belum berjalan baik. Dalam menetapkan kebijakan impor pangan misalnya, ini tidak boleh lagi serampangan dan menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai petani lagi-lagi menjadi korban akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat," papar dia.

Masih Tertekan

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2021 sebesar 104,68 atau naik 1,16% dari Juli 2021 sebesar 103,48. Kenaikan NTP Agustus 2021 dikarenakan Indeks

Harga yang Diterima Petani (It) naik 1,17% atau lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,01%. Kenaikan NTP Agustus 2021 ditopang subsektor tanaman pangan (1,39%), subsektor tanaman perkebunan rakyat (2,90%), dan subsektor perikanan (0,58%). Sementara itu, dua subsektor lainnya justru mengalami penurunan NTP, yakni tanaman hortikultura (1,42%) dan peternakan (1,33%).

Ruli Ardiansyah mengatakan, kenaikan NTP Agustus 2021 belum merepresentasikan situasi yang dihadapi petani. Subsektor pertanian, khususnya hortikultura, justru tertekan karena hasil panen di tingkat petani dihargai sangat murah. "Kami melihat tren ini (kenaikan NTP) lebih disebabkan pada satu subsektor yaitu perkebunan rakyat. Ini dapat dilihat sejak awal 2021, NTP perkebunan rakyatnya di atas 110 dan ini efeknya dirasakan oleh petani perkebunan.

Sementara di subsektor lainnya ini sangat fluktuatif. Kita lihat NTP tanaman pangan kendati naik pada Agustus nyatanya masih di 97,65 atau di bawah standar impas NTP," kata dia.

Baik laporan BPS ataupun anggota SPI di berbagai wilayah juga mencatat bahwa subsektor tanaman pangan khususnya gabah kerap di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah, ditambah persoalan lain seperti langkanya pupuk bersubsidi membuat beban petani makin berat. Untuk NTP hortikultura, rendahnya harga di tingkat petani juga masih menjadi momok, NTP hortikultura Agustus turun dan posisinya saat ini tipis di atas standar impas. Dari laporan petani anggota SPI di Bantul, Yogyakarta, harga-harga aneka cabai anjlok tajam dengan harga Rp 5.000 per kg untuk cabai rawit dan Rp 2.000 per kg untuk cabai keriting sehingga sebagian besar petani memilih tidak memanen cabainya. (d)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Sepuluh Indonesia | TANGGAL | 6/8/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

ASN Lamongan Wajib Beli Beras Petani Lokal

YUHRONUR Efendi tidak ingin melihat petani di wilayahnya merana. Karena itu, ia berusaha memproteksi mereka, terutama dalam soal pascapanen.

Bupati Lamongan, Jawa Timur, itu mengulirkan peraturan bupati yang mewajibkan aparat sipil negara penerima tambahan perbaikan penghasilan untuk membeli beras petani lokal. Jumlahnya dibatasi paling sedikit 10 kilogram per bulan.

"Ini ialah upaya menstabilkan harga beras lokal, sekaligus memperbaiki taraf hidup petani. Apalagi, Lamongan merupakan lumbung padi terbesar di Jawa Timur," jelas Yuhronur, kemarin.

Untuk kerja ini, Pemkab mengutus Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya. Mereka bekerja sama dengan 10 lumbung atau kelompok tani yang memasok beras.

Bupati menambahkan, penyerapan gabah dilakukan saat musim kemarau ketika harga beras tengah naik. Sementara bagi ASN, mereka tetap membeli beras dengan harga sama, di masa panen ataupun kemarau. **MA - 10**

"Program ini dikawal Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tanaman Pangan. Kami juga menjaga kepuasan ASN dengan kualitas beras yang baik dan harga yang tetap stabil setiap bulannya," tambah Sekretaris Daerah Mohammad Nalikan. (YK/N-2)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 6/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☐ Investor Daily	☒ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☒ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

E-PAPER MI

Menyongsong Badan Pangan Nasional

KINI, ketahanan pangan menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini bisa disimak dari pembentukan *holding* BUMN Pangan, *food estate*, dan yang terbaru ialah Badan Pangan Nasional (BPN). Semua langkah tersebut bukti keseriusan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan di Tanah Air.

FOKUS MI



Pindai QR Code untuk ulasan selengkapnya.

BPN menjadi hal yang hangat diperbincangkan. Pasalnya, badan baru ini resmi diperkenalkan ke publik pada 29 Juli 2021 lewat Peraturan Presiden Nomor 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Apa fokus dan tugas BPN? Apakah BPN menggantikan kementerian/lembaga yang mengurus pangan?

Media Indonesia mengupasnya dalam Fokus E-Paper Menyongsong Kehadiran Badan Pangan Nasional. (Des/X-3) MI. 1

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Siapa Menikmati Subsidi Pupuk?

Prof Tjipta Lesmana
Pengamat Ketahanan Pangan

SECARA implisit, ada dugaan subsidi pupuk selama ini merugikan pemerintah, karena hanya membawa keuntungan kepada produsen pupuk. Oleh sebab itu, sebaiknya cabut saja subsidi pupuk. Dana subsidi yang luar biasa jumlahnya sebaiknya diberikan langsung kepada petani yang membutuhkan pupuk.

Begitu kata Jusuf Kalla, ketika masih menjabat Wakil Presiden RI. Tatkala itu, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji serius wacana penggantian subsidi pupuk dengan pemberian subsidi langsung kepada petani.

Subsidi pupuk bisa dianalogikan dengan bansos, bantuan sosial kepada rakyat miskin. Karena sering terjadi tindak korupsi pada bansos. Bahkan seorang Menteri Sosial berhasil dituduh dan dihukum 12 tahun karena terlibat dalam kejahatan bansos.

Karenanya, Pemerintah SBY tempo hari memberikan bantuan itu langsung kepada rakyat yang berhak dalam bentuk BLT, melalui kantor pos. Maka, tertutup rapatlah celah-celah korupsi pada pemberian bansos.

Syahkan sekitar tiga minggu lalu ada webinar berjudul provokatif: "Siapa Yang Menikmati Subsidi Pupuk?" Tertarik dengan judul seperti itu, saya menyempatkan diri hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh beberapa petinggi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Tentu, subsidi pupuk tidak dapat dianalogikan dengan bantuan

sosial. Intinya, pembicara utama menaruh syakwasangka bahwa subsidi pupuk hanya menghamburkan uang negara, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang membuat Kementerian Keuangan babak-belur karena anggaran kesehatan yang luar biasa besarnya.

Dua argumentasi dasar dipakai untuk menghapus subsidi pupuk. Pertama, seragamkan jenis pupuk. Kenapa pabrik pupuk memproduksi begitu beragam pupuk? Jika dipakai pupuk tunggal, anggaran untuk pupuk petani bisa dihemat hingga 50 persen. Luar biasa!

Kedua, kenapa harga pupuk Indonesia kalah bersaing dengan harga di banyak negara yang juga produsen pupuk seperti Rusia, Malaysia, RRT dan sejumlah negara Arab? Mestinya, harga pupuk kita bisa ditekan jika dikelola secara efisien.

Tahun 2021, anggaran subsidi pupuk yang dikeluarkan pemerintah Rp 25,2 triliun, luar biasa. Bandingkan misalnya dengan subsidi BBM dan gas di tahun yang sama sejumlah Rp 54,4 triliun. Dari angka Rp 54,4 triliun itu, Rp 16,6 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM tertentu; sedang Rp 37,8 triliun untuk subsidi LPG tabung 3 kg. Hal itu berarti, subsidi untuk pupuk kira-kira 50 persen lebih besar dari subsidi BBM!

Memang betul, harga pupuk Indonesia tidak kompetitif dibandingkan dengan harga pupuk di sejumlah negara. Pertanyaan selanjutnya, kenapa begitu mahal? Data yang ada menunjukkan, 60-70 persen biaya produksi pupuk kita berasal dari biaya gas. Itu berarti,



harga gas kita mahal, meskipun selama tiga tahun terakhir pemerintah sudah menurunkan harga gas untuk sejumlah industri, termasuk industri pupuk.

Baru-baru ini harga dasar gas untuk industri pupuk sudah di tingkat 6 dolar AS per MMBTU. Presiden Jokowi yang memerintahkan Luhut Panjaitan (Menko Kemaritiman dan Investasi) menurunkan harga gas sejumlah industri, ketika harganya berkisar 7-9 dolar AS per MMBTU.

Sekadar catatan, total petani kita berkisar 25 juta; petani terdaftar 17 juta jiwa. Total lahan yang digarap berkisar 10,6 juta hektar. Dengan demikian, subsidi pupuk 25,2 triliun per tahun dinikmati oleh 17 juta petani.

Karena kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk kita, maka logikanya lahan yang disediakan pun harus ditingkatkan. Itulah sebabnya Jokowi meluncurkan, bahkan sudah melaksanakan proyek food estate

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

di berbagai provinsi seperti Kalimantan dan Sumatera. Dengan sendirinya, kebutuhan pupuk nasional pun meningkat.

Di Papua misalnya, pemerintah sedang membangun pabrik pupuk untuk siap-siap mencukupi peningkatan kebutuhan pupuk nasional. Di Palembang, Pupuk Sriwijaya pun memperluas unit produksinya.

Dewasa ini total kemampuan kapasitas produksi pupuk kita 13,9 juta ton per tahun. Pupuk subsidi yang dipasarkan 9 juta ton. Kenapa harga pupuk perlu disubsidi pemerintah?

Subsidi terjadi karena ada selisih antara biaya produksi dan Harga Eceran Tertinggi (HET). HET pupuk disusun bersama antara pemerintah (Kementan) dan DPR. Tujuan subsidi agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau.

Mereka yang "nafsu" menempuh jalan pintas untuk menghapus subsidi pupuk lupa bahwa pupuk komoditas sangat strategis.

Jangan lupa, kita berpenduduk 275 juta jiwa. Kebutuhan pangan amat besar. Untuk itu, ketahanan pangan harus terus-menerus dijaga. Ketahanan pangan tidak kalah strategis dibandingkan dengan ketahanan ekonomi atau ketahanan militer.

Maka, untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan pupuk yang disebut "6 Tepat", yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat dan tepat mutu.

Jika subsidi dihapus, dan uangnya diberikan langsung kepada kaum tani, "6 tepat" pasti akan berantakan; besar

kemungkinan distribusi pupuk akan *chaos*. Besar kemungkinan ketahanan pangan pun akan goyah!

Kenapa pemerintah tidak terapkan prinsip "pupuk tunggal", kenapa harus begitu banyak jenis pupuk yang diproduksi? Bukankah petani bisa mencampur sendiri pupuk-pupuk tunggal itu, bahkan juga untuk pembuatan pupuk organiknya? Jika pupuk tunggal diterapkan, harga pupuk, kata pembicara utama webinar tempo hari, niscaya bisa hemat 50 persen.

Pembicara, tampaknya tidak menyadari, bahwa tren penggunaan pupuk di mana-mana sudah meningkat sejak diperkenalkan tahun 2000-an. Penggunaan pupuk di tingkat petani juga bisa lebih rasional berdasarkan kondisi tanah setempat.

Para ahli pertanian tentu tahu, tidak semua lahan cocok dengan satu jenis pupuk saja; ada yang cocok dengan pupuk A, ada pula lebih cocok (lebih subur) dengan menggunakan pupuk B dan sebagainya.

Semua ini tidak berarti subsidi pupuk tidak ada masalah lagi. Keluhan petani di mana-mana terutama menyangkut distribusi pupuk yang membuat petani kesal. Sistem distribusi, jelas, harus diperbaiki. Birokrasi pendaftaran dan akses kartu tani harus disederhanakan.

Akses bantuan bank petani juga harus terus dipermudah, jangan hanya sebatas bibir. Tentu, efisiensi pengelolaan pupuk perlu terus diupayakan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi harga. (*)

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☒ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 6/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 4/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☒ Opini/Artikel
☒ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

KRISIS AIR BERSIH

Berebut Air dengan Kawanan Sapi

Fransiskus Pati Herin

Musim kemarau seperti momok yang menakutkan bagi sejumlah perempuan lanjut usia di Kampung Fatubesi, Desa Manulea, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Persediaan air di rumah, khususnya untuk mandi dan cuci yang ditampung saat musim hujan, habis. Mereka harus pergi ke kali setiap sore hari.

Kondisi jalan ke kali berupa jalan setapak berbatu dengan turunan yang agak terjal. Ada yang berjalan dengan bantuan tongkat. Di kali masih ada sisa aliran air yang hampir kering akibat kemarau panjang. Hingga awal September 2021, sudah lima bulan daerah itu tidak diguyur hujan.

Setiap hari, mereka sudah harus tiba di kali paling lambat pukul 15.30, sebelum datang kawanan sapi yang juga memerlukan air di kali itu. Jika terlambat, mereka akan mendapati kotoran sapi berseliweran di aliran air. Air semakin keruh, kotor, dan bau. Butuh berjam-jam menunggu hingga air bisa digunakan lagi.

Mereka menggunakan air itu untuk mencuci pakaian, mandi, dan dibawa pulang untuk kebutuhan toilet. "Jadi, setiap hari mereka seperti berebutan air dengan sapi," kata Joseph Astro (38), warga Manulea, pada Jumat (3/9/2021).

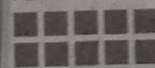
Untuk air minum, mereka harus berjalan kaki ke sumber terdekat, menjinjing jeriken sambil menjunjung ember. Terkadang, jika terdesak, mereka patungan untuk membeli air seharga Rp 300.000 per tangki ukuran 5.000 liter.



Sektor yang Memerlukan Ketersediaan Air di NTT

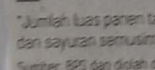
Pertanian:

Padi 180.833 hektar



Hortikultura*

18.062 hektar



Peternakan:

Babi 2,6 juta ekor



Sapi 1,1 juta ekor



Proyek air:

Bendungan 8



Embung 11



Petani melintasi areal pertanian yang mengalami kekeringan di Oesao, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (21/6/2021). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan ancaman kekeringan di hampir semua wilayah NTT.

K

FOTO: KOMPAS-FRANSISKUS PATI HERIN, INFOGRAFIK: ANDRI

Harga itu sangat mahal untuk mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Sehari-hari, mereka bertani, menanam, dan mengambil hasil dari hutan, seperti buah asam.

Padahal, menurut Joseph, tak jauh dari Fatubesi ada sumber mata air Tabonat. Air dari sana seharusnya bisa dialirkan ke Fatubesi. "Masalah ini bukan baru kemarin. Ini sudah dari dulu. Sepertinya tidak ada kepedulian dari pemerintah," kata Joseph.

Kompas pernah mendatangi tempat itu pada Oktober 2020. Daerah itu dilanda krisis air bersih lebih dari setengah ta-

hun. Padahal, penyediaan air bersih untuk mendukung sanitasi lingkungan menentukan tumbuh kembang anak.

Banyak anak mengalami tengkes lantaran buruknya sanitasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Yayasan Pijar Timur Indonesia, hingga 2020, sebanyak 114 desa atau sekitar 90 persen dari 127 desa di Malaka belum memenuhi standar sanitasi total berbasis masyarakat. Yang memenuhi standar baru 13 desa.

Dari anak yang mengalami tengkes, 70 persen disebabkan oleh sanitasi lingkungan. Faktor gizi hanya 30 persen.

Nasib peternakan

Musim kemarau juga menjadi bencana bagi peternakan sapi di NTT. Para peternak kesulitan mencari pakan ternak berupa rumput. Sapi dilepas begitu saja, mengais daun-da-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/8/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

un kering di tengah areal yang gersang. Untuk minum sapi, peternak terpaksa harus membeli air dari mobil tangki.

Goris Sikas (48), warga Desa Kaubele, Timor Tengah Utara, menuturkan, setiap hari, puluhan sapi miliknya membutuhkan sekitar 200 liter air untuk minum. Selama beberapa bulan lalu, ia mengandalkan air sumur, namun kini sejumlah sumur kering. Ia akhirnya membeli air dari mobil tangki.

Menurut dia, banyak peternak kewalahan sehingga pemberian pakan dan air tidak maksimal. Banyak sapi kurus, bahkan mati, gara-gara kekurangan air. Peternak pun rugi. Saat ini, harga seekor sapi siap potong sekitar Rp 9 juta.

Kondisi ini membuat bisnis ternak sapi di NTT tidak bisa maju pesat. Padahal, NTT digadang-gadang menjadi provinsi ternak sapi. Sapi dari NTT akan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jakarta. "Mau kirim sapi yang

bagus agak susah. Banyak sapi kurang gizi," ujar Goris.

Menurut data Dinas Peternakan NTT, pada 2020 ada 1,1 juta sapi di NTT. Jumlah itu di bawah target 1,3 juta ekor per tahun. Kurangnya pakan, terutama air, jadi faktor utama penghambat kemajuan bisnis peternakan.

Ancaman pertanian

Krisis air juga mengancam sektor pertanian. Areal pertanian di Kabupaten Kupang, di sisi Jalan Timor Raya, yang membelah Pulau Timor dari Kota Kupang ke Timor Leste, banyak dibiarkan. Petani tak berdaya. Sebagian dari mereka bekerja serabutan. "Tunggu musim hujan, baru balik lagi ke kebun," kata Emu Ndun (55), petani di Desa Oesao.

Kondisi ini mengancam ketahanan pangan warga setempat. Program Pemprov NTT bertajuk Tanam Jagung 1.000 Hektar dan Panen Sapi 1.000 Ekor bakal sulit terwujud.

Sekretaris Daerah NTT Benediktus Polo Maing mengatakan, solusi krisis air bersih sempat dibahas dalam rapat lintas dinas, Rabu (1/9). Sejumlah langkah teknis disiapkan. Namun, Polo belum bisa menjelaskan secara konkret.

Direktur Circle of Imagine Society (CIS) Timor Haris Oematan, beberapa waktu lalu, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam menangani isu air bersih di NTT, yakni membangun bendungan. Saat ini di NTT terdapat 19 bendungan dan embung yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, misalnya, sudah mulai memberi manfaat, terutama mengairi areal pertanian. Namun, di luar itu, masih banyak daerah di NTT belum terlayani kebutuhan air bersih, seperti di Fatubesi.

Sampai kapan warga terus berebut air dengan kawanan sapi?

2